



Bank Syariah
Rahmania

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA 2025

Bank Syariah Rahmania

Telp (0644) 323019
Fax (0644) 21060



Jl. T. Hamzah Bendahara No. 35-36,
Kota Juang, Bireuen



bprsrahmania@yahoo.co.id



www.banksyariahrahmania.com



LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT. BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA TAHUN 2025

1. PENJELASAN UMUM TRANSPARANSI TATA KELOLA

Informasi Umum BPRS	
Nama BPRS	PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera
Alamat	Jl. T. Hamzah Bendahara No. 35-36 Bandar Bireuen Kec. Kota Juang Kab. Bireuen.
Nomor Telepon	0644 – 323019

Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 : 01
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 1 : 21 April 2025
Nomor Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 : 04
Tanggal Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester 2 : 29 Desember 2025

Penjelasan Umum:

Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja serta memberikan kepastian kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan. Pelaksanaan kegiatan operasional tercermin dalam suatu mekanisme corporate governance, penerapan fungsi kepatuhan terhadap peraturan dan perundangan yang berlaku diharapkan dapat meminimalisir risiko sehingga tercipta kinerja yang baik.

Dewan Komisaris menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pelaksanaan kerja Bank yang dilaksanakan oleh manajemen sesuai dengan ketentuan serta memberikan saran atas tindakan atau kegiatan strategis yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan perusahaan. Direksi memastikan dalam fungsi kepengurusannya dilaksanakan secara profesional serta menghindari terjadinya segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest). Bank akan meningkatkan unsur kehati-hatian, budaya kepatuhan, budaya sadar risiko dan praktik bank yang sehat dalam pelaksanaan tata kelola.

Pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa Laporan Penerapan Tata Kelola PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera tahun 2025 telah disusun sesuai POJK Nomor 09 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Tata Kelola	
Nilai Komposit	Tingkat Komposit
1.2	1
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	
Berdasarkan hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola, PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera memperoleh Nilai Komposit sebesar 1,2 dengan Tingkat Komposit 1, yang mencerminkan bahwa penerapan tata kelola perusahaan berada dalam kategori Sangat Baik. Secara umum, struktur, proses, dan hasil penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara memadai dan konsisten sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Meskipun demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam aspek penguatan efektivitas pengendalian internal, pendalaman penerapan manajemen risiko, serta peningkatan kualitas dokumentasi dan pemantauan kepatuhan. Ke depan, perusahaan diharapkan terus melakukan penyempurnaan secara berkelanjutan guna memastikan penerapan Tata Kelola yang semakin efektif, adaptif terhadap dinamika risiko, serta selaras dengan prinsip kehati-hatian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

2. LAPORAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DIREKSI.

Nama	T. Ahmad Naufal
NIK	3175021504940002
Jabatan	Direktur Utama
Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memimpin dan mengkoordinir para manajer di PT. BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA secara baik dan profesional, guna mewujudkan tujuan, visi dan misi PT. BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA. 2. Menjaga agar pelaksanaan operasional lembaga sesuai dengan ketentuan dan peraturan, baik eksternal (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Edaran, Surat Keputusan departemen terkait dan lain-lain) maupun internal (Kebijakan & Sistem Prosedur Perusahaan). 3. Membina hubungan baik dengan pihak luar melalui pertemuan-pertemuan, negosiasi atau memenuhi undangan dari pihak luar terkait, baik pemerintah ataupun non-pemerintah. 4. Memberikan tugas, arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. 5. Bertanggung jawab terhadap kinerja BPRS	

6. Memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi bulanan berkaitan dengan kinerja setiap Unit Kerja yang dipimpinnya.
7. Membuat laporan secara periodik dan berkesinambungan kepada Dewan Komisaris.
8. Menjaga dan memastikan agar BPRS yang dipimpinnya dapat mencapai target yang diberikan baik secara kuantitatif maupun kualitatif, yang mencakup pendanaan, pembiayaan, jasa, hasil usaha dan kualitas aktiva produktif.
9. Mengembangkan kemampuan diri maupun staf yang dipimpinnya melalui program pelatihan dan pengembangan karyawan yang terencana.
10. Menegakkan disiplin dan meningkatkan dedikasi karyawan dengan memberikan teladan yang baik dalam segala aspek pekerjaan.
11. Menjamin bahwa laporan kepada Dewan Komisaris telah benar dan dikirim tepat waktu.
12. Akuntabilitas atas kerugian usaha sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan Dewan Komisaris.

Nama	Junardi
NIK	1111090812790001
Jabatan	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Tugas dan Tanggung Jawab :	
1. Menyusun dan penyampaian usulan kepada Direksi lainnya mengenai kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, nilai perusahaan, dan kebijakan pengembangan usaha jangka panjang; 2. penyusunan kebijakan kepatuhan serta evaluasi penilaian efektivitas budaya kepatuhan dan budaya kerja dengan mempertimbangkan penghargaan (<i>reward</i>) dan pendisiplinan (<i>punishment</i>) yang tepat, seperti pelaksanaan kampanye budaya kepatuhan 3. Peningkatan kompetensi kepatuhan yang berkelanjutan, seperti penyelenggaraan program pembelajaran mandiri (<i>self-learning</i>) terutama bagi sumber daya manusia di bidang kepatuhan dan prinsip syariah 4. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan serta menetapkan atau mengevaluasi ketentuan dan pedoman internal Bank 5. Menyesuaikan kebijakan dan pedoman internal terhadap perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah 6. Menetapkan langkah yang diperlukan dan mencegah secara optimal agar Direksi lain tidak menetapkan kebijakan/keputusan yang menyimpang dari POJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah; 7. Menindaklanjuti penyimpangan yang dilakukan oleh anggota Direksi, kepada anggota Direksi yang lain, Dewan Komisaris, dan/atau OJK. Yang mana laporan kepada Dewan Komisaris dapat disertai dengan konsep surat teguran kepada anggota Direksi lain yang melakukan penyimpangan untuk ditandatangani; 8. Memastikan penyelesaian komitmen oleh Direksi dan unit kerja terkait komitmen kepada OJK maupun otoritas lain; 9. Melakukan upaya untuk meminimalkan risiko kepatuhan	

10. Koordinasi dengan DPS terkait pelaksanaan tugas fungsi kepatuhan dalam pemenuhan Prinsip Syariah.
11. Memberikan opini/review pada setiap proses penyaluran pembiayaan

3. LAPORAN MANAJEMEN PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Nama	Irfan Abdullah
NIK	1174020211810001
Jabatan	Komisaris Utama
Tugas dan Tanggung Jawab :	
1. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan rasio keuangan Bank 2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi Bank sesuai ketentuan 3. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap perkembangan tingkat kesehatan dan usaha Bank 4. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank	

4. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DPS

Nama	Syamaun Risyad
NIK	1173010102500002
Jabatan	Ketua Dewan Pengawas Syariah
Tugas dan Tanggung Jawab :	
1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. 3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya. 4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS. 5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya. 6. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan. 7. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.	

Nama	Umar Budiman
NIK	1173020404550001
Jabatan	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Tugas dan Tanggung Jawab :	
1. Mengevaluasi kebijakan dan standar prosedur operasional BPRS agar sesuai dengan Prinsip Syariah. 2. Mengawasi proses pengembangan produk baru BPRS agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.	

3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru BPRS yang belum ada fatwanya.
4. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa BPRS.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja di BPRS untuk pelaksanaan tugasnya.
6. Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS setiap semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.
7. Laporan hasil pengawasan wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 bulan setelah semester berakhir.

5. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, PROGRAM KERJA, DAN REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE.

Saat ini PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera belum memiliki Tim Komite.

6. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DPS DAN PEMEGANG SAHAM PADA KELOMPOK USAHA BPR SYARIAH.

Anggota Direksi			
Nama	NIK	Kelompok Usaha	Persentase Kepemilikan %
T. Ahmad Naufal	3175021504940002	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.00%
Junardi	1111090812790001	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.00%

Anggota Komisaris			
Nama	NIK	Kelompok Usaha	Persentase Kepemilikan %
Irfan Abdullah	1174020211810001	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.00%

Anggota Dewan Pengawas Syariah			
Nama	NIK	Kelompok Usaha	Persentase Kepemilikan %
Syamaun Risyad	1173010102500002	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	3.31%
Umar Budiman		BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.00%

Pemegang Saham			
Nama		Kelompok Usaha	Persentase Kepemilikan %
Yayasan Rahmania Fortuna		BPRS Rahmania Dana Sejahtera	52.93%
Yayasan Gerbang Anak Sejahtera		BPRS Rahmania Dana Sejahtera	14.95%

Hasan Saad	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	5.52%
Abdul Rahman Abbas	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	5.57%
Syamaun Risyad	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	3.31%
Mawardi Ismail	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	3.80%
Rizal Aswandi	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	4.76%
T. Fachruddin	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	2.61%
Joni Yunus	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	1.78%
Syhabuddin AR	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	1.78%
T. Ajuransyah	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	1.45%
Amir Fauzi	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.70%
T. Ridwan	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.43%
M. Natsir Mahmud Nur	BPRS Rahmania Dana Sejahtera	0.40%

7. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS PADA PERUSAHAAN LAIN

Anggota Dewan Pengawas Syariah			
Nama	NIK	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan %
Syamaun Risyad	1173010102500002	BPRS Rahmah Hijrah Agung	21.28%

8. HUBUNGAN KEUANGAN DAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DPS, DAN PEMEGANG SAHAM PADA BPRS RAHMANIA DANA SEJAHTERA

NAMA	Hubungan Keuangan dan Keluarga			
	I. Anggota Direksi	II. Anggota Dewan Komisaris	III. DPS	IV. Pemegang Saham
Anggota Direksi				
T. Ahmad Naufal	tidak ada	tidak ada	tidak ada	Ada/Orang Tua
Junardi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Anggota Dewan Komisaris				
Irfan Abdullah	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Anggota DPS				

Syamaun Risyad	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Umar Budiman	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Pemegang Saham				
Yayasan Rahmania Fortuna	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Yayasan Gerbang Anak Sejahtera	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Hasan Saad	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Abdul Rahman Abbas	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Syamaun Risyad	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Mawardi Ismail	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Rizal Aswandi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
T. Fachruddin	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Joni Yunus	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Syhabuddin AR	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
T. Ajuransyah	Ada/Anak	tidak ada	tidak ada	tidak ada
Amir Fauzi	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
T. Ridwan	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada
M. Natsir Mahmud Nur	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada

9. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PENGAWA SYARIAH.

Nama	Nama Lembaga Keuangan Syariah Lain	Jabatan
Syamaun Risyad	BPRS Rahmah Hijrah Agung	Ketua DPS

10. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DPS

Gaji Direksi dalam 1 (satu) Tahun	
Jumlah Direksi Penerima Gaji	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji	Rp 317.745.372,-
Honorarium Komisaris dalam 1 (satu) Tahun	
Jumlah Komisaris Penerima Honorarium	1 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Honorarium	Rp 57.869.160,-
Honorarium DPS dalam 1 (satu) Tahun	
Jumlah DPS Penerima Honorarium	2 Orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Honorarium	Rp 41.665.788,-

11. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH.

Deskripsi	Perbandingan
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang terendah	1.25
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah	0

Rasio gaji anggota DPS yang tertinggi terhadap gaji anggota DPS yang terendah	1.25
Rasio gaji pegawai yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang terendah	2.82
Rasio gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi terhadap gaji anggota Direksi yang tertinggi	0.35
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	2.17

12. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEHADIRAN ANGGOTA KOMISARIS

Tanggal	Jumlah Peserta	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran	Agenda
		Fisik	Online		
17 Maret 2025	3	1	0	100	1. Dewan Komisaris mengevaluasi hasil audit internal BPRS 2. Dewan Komisaris memantau progres hasil audit KAP 2024 3. Dewan Komisaris menekankan pentingnya tindak Lanjut Cepat, Tepat, dan Terukur atas Surat Masuk dari Ojk 4. Dewan Komisaris memantau terkait rasio keuangan BPRS 5. Isu-Isu Strategis Bank
20 Mei 2025	3	1	0	100	1. Mengevaluasi hasil audit internal Bank Syariah Rahmania. 2. Evaluasi realisasi target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank (RBB) semester I tahun 2025. 3. Kegiatan Operasional Bank Syariah Rahmania. 4. Penerapan APU PPT 5. Isu-Isu Strategis Bank
17 Juni 2025	4	1	0	100	1. Evaluasi proses bisnis bank, khususnya terkait pembiayaan dan capaian kinerja terhadap Rencana Bisnis Bank (RBB). 2. Pembahasan tindak lanjut atas temuan audit internal.

					3. Evaluasi kepatuhan dan implementasi tata kelola perusahaan. 4. Kelengkapan struktur organisasi (anggota Dewan Komisaris). 5. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu.
24 Juni 2025	2	1	0	100	1. Dewan Komisaris berencana akan melakukan penjajakan kerja sama dengan Dayah Ulumuddin khususnya Pembiayaan untuk ditujukan utk kebutuhan para dewan guru. 2. Penawaran Pembiayaan kepada Nasabah Tabungan dan deposito 3. Disarankan untuk secara proaktif menawarkan produk pembiayaan kepada nasabah existing yang memiliki rekening tabungan, terutama yang menunjukkan potensi kelayakan. 4. Penawaran Ulang pembiayaan kepada Nasabah Jatuh Tempo dengan Pembayaran Lancar. 5. Tim diminta untuk meninjau portofolio pembayaran nasabah pembiayaan yang telah jatuh tempo namun memiliki riwayat pembayaran lancar, guna ditawarkan kembali fasilitas pembiayaan. 6. Audit di minta utk verifikasi dan pengecekan terhadap dokumen jaminan milik nasabah yang akan dilakukan kunjungan lapangan (OTS) sebagai bagian dari proses monitoring dan evaluasi pembiayaan. 7. Dewan Komisaris membahas rencana pengisian kekosongan anggota komisaris, dengan target pemenuhan komitmen kepada OJK paling lambat bulan September 2025.
01 Juli 2025	3	1	0	100	1. Pembahasan kinerja Semester pertama tahun 2025. 2. Pembahasan tindak lanjut atas temuan audit internal.

					3. Rencana strategis semester tahun kedua 2025. 4. Pembahasan hal-hal lain yang dianggap perlu
21 Oktober 2025	4	1	0	100	1. Dewan Komisaris menekankan perlunya peningkatan efektivitas pengendalian internal serta kepatuhan terhadap seluruh kebijakan dan prosedur operasional yang berlaku. Dewan Direksi diminta untuk menindaklanjuti seluruh temuan audit internal melalui langkah perbaikan yang konkret dan terukur. 2. Dewan Komisaris menyoroti bahwa realisasi pembiayaan masih berada di bawah target RBB Tahun 2025, yaitu sebesar 94,2%. Oleh karena itu, Dewan Direksi diminta untuk melakukan evaluasi terhadap strategi pemasaran, memperkuat peran Account Officer (AO), serta meningkatkan pengawasan terhadap nasabah eksisting guna mendorong peningkatan pembiayaan. 3. Dewan Komisaris meminta agar rasio pembiayaan bermasalah (NPF) dapat terus ditekan hingga berada di bawah 10% melalui penguatan proses penagihan, upaya restrukturisasi yang tepat sasaran, serta pemantauan kolektabilitas nasabah secara berkelanjutan. 4. Dewan Komisaris menegaskan pentingnya penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2026 dilakukan secara tepat waktu, komprehensif, dan realistis dengan mempertimbangkan proyeksi kondisi ekonomi syariah. Untuk itu, Dewan Direksi diminta membentuk tim penyusun yang melibatkan lintas unit kerja terkait. 5. Dewan Komisaris menekankan pentingnya pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki independensi,

					kredibilitas, serta pengalaman yang memadai. Dewan Direksi diminta untuk menyampaikan hasil evaluasi terhadap calon KAP paling lambat sebelum akhir Desember 2025. 6. Dewan Komisaris menegaskan agar seluruh temuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan progres penyelesaiannya dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris.
23 Desember 2025	8	1	0	100	1. Evaluasi kinerja Bank 2. Peningkatan rasio NPF 3. Dampak musibah banjir terhadap nasabah 4. Penyaluran pembiayaan 5. Penyusunan RBB Tahun 2026

13. PELAKSANAAN RAPAT DAN KEHADIRAN ANGGOTA KOMISARIS

Tanggal	Jumlah Peserta	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran	Agenda
		Fisik	Online		
21 Januari 2025	9	2	0	100	1. Bagaimana Pandangan DPS (Dewan Pengawas Syariah) tentang talangan Haji? 2. Bagaimana Pandangan DPS (Dewan Pengawas Syariah) tentang talangan Umroh? 3. Bagaimana Pandangan DPS (Dewan Pengawas Syariah) tentang Pembiayaan multijasa? 4. Akad pembiayaan apa yang cocok untuk pembiayaan haji dan umroh? 5. Diskusi tentang POJK No. 25 tahun 2024 tentang tata kelola syariah 6. Tausiah dan Tanya Jawab.
21 April 2025	8	2	0	100	1. Direksi menjelaskan dan melaporkan laporan keuangan Bank 2. Diskusi tentang pengelolaan dana zakat dan menyalurkan hasil pengelolaan wakaf, Bank saat ini sudah menjadi LKS PWU (Lembaga Keuangan Syariah Pengelola Wakaf Uang) dan sudah

					bekerja sama dengan Yayasan wakaf cendikia. 3. Arahan DPS(Dewan Pengawas Syariah) dalam menjaga kepatuhan syariah. 4. Tausiah dan Tanya Jawab. 5. Silaturahmi dengan pengurus DPS (Dewan Pengawas Syariah).
23 Juli 2025	10	2	0	100	1. Direksi menjelaskan dan melaporkan laporan keuangan Bank. 2. Diskusi tentang budaya kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank. 3. Diskusi tentang DSN No 4 tentang Akad Murabahah. 4. Diskusi tentang aturan tata kelola BPRS terhadap fungsi DPS (Dewan Pengawas Syariah) 5. Tausiah dan Tanya Jawab. 6. Silaturahmi dengan pengurus DPS (Dewan Pengawas Syariah).
29 Desember 2025	10	2	0	100	1. Direksi menjelaskan dan melaporkan laporan keuangan Bank. 2. Diskusi tentang budaya kepatuhan terhadap prinsip syariah pada Bank. 3. Diskusi terkait kondisi dan penanganan nasabah yang mengalami dampak bencana. 4. Tausiah dan Tanya Jawab. 5. Silaturahmi dengan pengurus DPS (Dewan Pengawas Syariah).

14. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Pada tahun 2025, PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mencatat adanya kasus penyimpangan internal (internal fraud).

15. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI.

Pada tahun 2025, PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera menghadapi permasalahan hukum berupa adanya laporan dugaan tindak pidana yang diajukan oleh nasabah terhadap perusahaan. Atas laporan tersebut, perusahaan telah bersikap kooperatif dan mengikuti seluruh proses yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

17. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

1.	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Berbagi Takjil bulan Ramadhan
	Jumlah (Rp)	Rp 2.000.000,-
2.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juni 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Rakyat Palestina
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan peduli Palestina
	Jumlah (Rp)	Rp 1.005.500,-
3.	Tanggal Pelaksanaan	30 Juni 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Difabel
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi kegiatan motivasi untuk penyandang disabilitas
	Jumlah (Rp)	Rp 500.000,-
4.	Tanggal Pelaksanaan	10 September 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan sosial (khanduri) Ummat MES
	Jumlah (Rp)	Rp 5.000.000,-
5.	Tanggal Pelaksanaan	02 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi kegiatan Maulid Meunasah Kota
	Jumlah (Rp)	Rp 500.000,-
6.	Tanggal Pelaksanaan	13 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi kegiatan Maulid Desa Karang Rejo
	Jumlah (Rp)	Rp 200.000,-
7.	Tanggal Pelaksanaan	23 Oktober 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi kegiatan Maulid Meunasah Kulah Batee
	Jumlah (Rp)	Rp 500.000,-
8.	Tanggal Pelaksanaan	17 November 2025
	Jenis Kegiatan	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Masyarakat Umum
	Penjelasan Kegiatan	Kegiatan Santunan anak yatim MA Plus
	Jumlah (Rp)	Rp 1.000.000,-

Demikian Laporan Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance). Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan kepada para pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan tata kelola di lingkungan perusahaan.

Bireuen, 23 April 2025
PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera
Dewan Direksi


T. Ahmad Naufal
Direktur Utama


Junardi
Direktur YMK

